

KETUA KPU HASYIM ASY'ARI DAN PUSARAN KONTROVERSI

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, nama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari makin menjadi buah bibir publik. Mulai dari deretan statmen yang dinilai kontroversial sehingga membuat partai politik (parpol) geram. Bahkan, Hasyim juga sempat dilaporkan organisasi keagamaan hingga dugaan pelecehan. Terbaru diapun melontarkan candaan, "Saya Ahli Maksiat, DKPP Cuma Boleh Adili yang Ada Kehormatan," ujarnya dalam rapat koordinasi bersama KPU provinsi, Kamis (5/1/2023). Namun di sisi lain, kinerjanya sebagai pelaksana pesta demokrasi juga terus berjalan sesuai target dan harapan para peserta Pemilu. Terbaru, dia memastikan bakal melibatkan partai politik dalam penataan dan penyusunan daerah pemilihan (dapil) DPR RI dan DPRD provinsi. Meskipun kemudian dia juga menggaris bawahi, pihaknya telah menyiapkan rumus matematika khusus.

(Baca Hal 11)

1. PERNYATAAN SOAL KEMUNGKINAN PEMILU TERTUTUP

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan ada kemungkinan sistem Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 akan kembali menggunakan sistem proporsional tertutup. Sebagai informasi, pada sistem pemilihan proporsional tertutup, setiap parpol tetap diminta mengirimkan daftar kandidat wakil rakyat. Namun, pemilih tidak secara langsung memilih mereka dan hanya diminta untuk memilih tanda gambar atau lambang parpol. Kandidat dengan nomor urut terkecil dalam suatu partai berhak menduduki kursi pertama di lembaga perwakilan. Hasyim menjelaskan hal tersebut hanya sebatas asumsi berdasarkan adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Kepemiluan saat ini. Jadi, kata dia, hal itu bukanlah usulan dari KPU melainkan dari kondisi faktual kepemiluan yang terjadi saat ini.

Government (Hal.2)
Buntut Video Bocoran Vonis Sambo, MA Turunkan Tim Periksa Hakim Wahyu

DERETAN KONTROVERSI DI SEPUTAR HASYIM ASY'ARI

2. DIPAPORKAN DUGAAN PELECEHAN SEKSUAL

Ketua KPU Hasyim Asy'ari dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP atas dugaan pelecehan seksual terhadap Ketua Umum Partai Republik Satu Mischa Hasnaeni Moein yang menjulukinya sebagai Wanita Emas. Hasyim dilaporkan oleh 9 partai politik yang tergabung dalam wadah Gerakan Melawan Political Genocide (GMPG), pada Minggu, 25 Desember 2022. Sebagai informasi, Parpol yang melaporkan Hasyim merupakan partai yang tidak lolos mengikuti tahapan Pemilu 2024.

3. HASYIM MENILAI KOTAK ALUMINIUM RAWAN DICURI

Salah satu pernyataan Hasyim yang menjadi sorotan adalah saat dia menyebut kotak suara aluminium bernilai tinggi sehingga mendorong orang untuk mencurinya. "Kotak aluminium ini nilainya sangat menggoda, nilainya tinggi, sehingga mendorong orang menguasai tanpa hak dan dijual di luar," kata Hasyim dalam acara Catatan Akhir Tahun 2022 di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis, 29 Desember 2022. Oleh karena itu, Hasyim mengatakan, kotak suara kardus rencananya bakal kembali dipakai pada Pemilu 2024.



Buntut Video Bocoran Vonis Sambo, MA Turunkan Tim Periksa Hakim Wahyu

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) akan menurunkan tim untuk mengusut video viral yang memperlihatkan seorang pria diduga Ketua Majelis Hakim Kasus Ferdy Sambo, Wahyu Iman Santoso. Dalam video tersebut, pria itu diduga membicarakan soal kasus Sambo bersama dengan seorang perempuan.

Juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, menyebut tim akan memanggil Wahyu untuk mendalami video tersebut. "Mahkamah Agung setelah mengecek dari berita medsos yang beredar maka MA menyikapi akan menurunkan tim untuk memeriksa hakim yang bersangkutan," kata Andi saat dikonfirmasi, Kamis (5/1/2023).

Meski demikian, Andi menegaskan bahwa MA tetap akan menjaga independensi hakim dalam proses klarifikasi itu. "Tetapi MA tentu tetap menjaga independensi hakim dalam penanganan perkara menarik yang sedang ditangani hakim tersebut," ungkap Andi.

Selain MA, Komisi Yudisial (KY) juga sudah menyatakan akan mendalami video yang beredar itu. KY terlebih dahulu akan mendalami kebenaran soal video tersebut. "KY akan telusuri dulu kebenaran dari video dan caption (keterangan) tersebut. Karena ada tiga hal terkait hal ini, yaitu ada videonya, ada captionnya yang secara sekilas tidak saling berhubungan, dan ada suara pihak lain selain hakim," kata jubi KY Miko Ginting.

Dua video tersebut diunggah oleh akun hakim_halu_ dan akun pencerahkasus. Video pertama yang diunggah hakim_halu_ berdurasi 1 menit 26 detik. Isinya memperlihatkan pria diduga Hakim Wahyu tengah berbincang melalui telepon.

Dalam narasi di video, terdapat tulisan yang menyebut bahwa Hakim Wahyu menelepon Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Namun dalam narasi tersebut pun masih

disertai dengan tanda tanya.

Pada video tersebut, ini penggalan percakapan yang dibicarakan oleh Hakim Wahyu saat menelepon seseorang: "Enggak perlu, pokoknya selesai dari sini saya ke sana. (jeda) Siapa? oh siap, siap. (jeda) Iya pokoknya setelah selesai ini saya ke sana. (jeda) Iya, iya."

Setelah telepon berakhir, pria yang diduga Hakim Wahyu itu kemudian bicara dengan perempuan yang merekam video tersebut. "Bukan, masalahnya dia enggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Yosua, tapi nggak apa-apa, sah-sah saja. Saya enggak akan pressure dia harus ngaku, saya enggak butuh pengakuan," ujar diduga Hakim Wahyu.

Sementara dalam video kedua, diunggah oleh akun pencerahkasus dengan durasi 1 menit 8 detik. Isinya tak jauh berbeda dengan video pertama, tetapi lebih pendek. Hanya memperlihatkan saat diduga Hakim Wahyu berbincang dengan perempuan. Dalam video kedua tersebut, muncul juga tangkapan layar diduga pengunggah video atas nama akun dewinta231. Dia menulis: hukuman seumur hidup.

Penahanan Diperpanjang 30 Hari

Di sisi lain, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperpanjang masa penahanan lima terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J selama 30 hari. Kelima



Majelis Hakim dari PN Jakarta Selatan Wahyu Iman Santoso (baju hitam). (Foto-dok)

terdakwa itu adalah Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer atau Bhadara E, Ricky Rizal atau Briпка RR dan Kuat Ma'ruf.

"Masa perpanjangan penahanan tersebut mulai tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan 6 Februari 2023," ujar Pejabat Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto, Kamis (5/1/2023).

Djuyamto yang juga Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat itu menjelaskan bahwa perpanjangan penahanan Sambo dkk telah sesuai dengan Pasal 29 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3b dan Ayat 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHP). "Jika pada tanggal 6 Februari 2023 pemeriksaan perkara tersebut belum selesai akan dimintakan permohonan perpanjangan penahanan yang kedua selama 30 hari," jelasnya.

Terpisah Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Didik Mukrianto mengatakan, "Komisi Yudisial harus segera merespons, mendalami, dan melakukan pemeriksaan terhadap substansi video tersebut. Jika video tersebut benar adalah Hakim Wahyu, maka harus dilakukan pemeriksaan dan pendalaman dengan serius dan saksama terkait dengan potensi pelanggaran etik dalam menjalankan profesinya," kata Didik saat dihubungi, Kamis (5/1/2023).

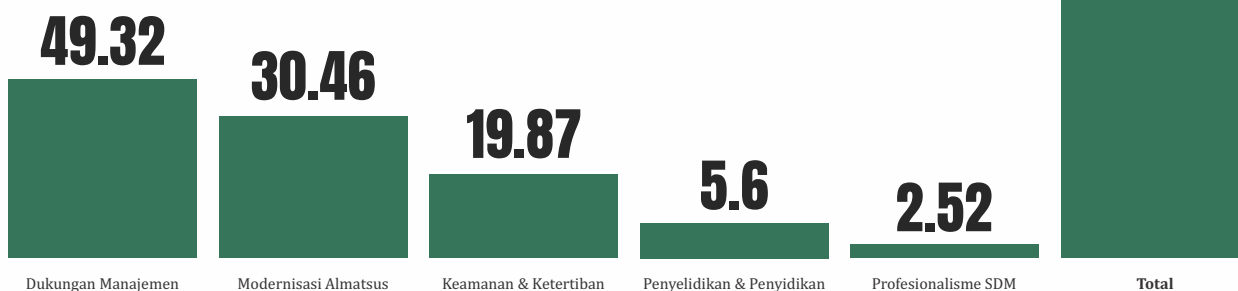
"Dan jika ada pelanggaran etik, harus dijatuhkan sanksi yang tegas, demikian juga jika ada unsur gratifikasi atau suapnya harus diproses," imbuhnya.

Didik menegaskan kejadian ini harus mendapat perhatian serius. Ia mengingatkan, hakim adalah aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan yang dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral, dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan.

"Semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu. Hakim harus berintegritas tinggi, jujur, dan profesional," tegasnya. (wid,ist,rls/dya)

RINCIAN ANGGARAN POLRI DALAM RAPBN 2023

(Rp Triliun)



2023 Tak Ada Anggaran Pandemi, DPR Minta Vaksinasi Tetap Gratis



(Ilustrasi) Masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi diminta segera mendapatkan suntikan karena masih tersedia pelayanan gratis di semua fasilitas kesehatan. (Foto-dok)

JAKARTA - Alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan Covid-19 dalam APBN 2023 akan diberhentikan. Berbagai kabar bila vaksinasi hingga pengobatan bakal ditanggung mandiri pun menyebar. DPR RI meminta agar pemerintah melakukan pertimbangan matanag, terutama terkait pemberian vaksinasi corona.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh berharap pemerintah tetap menyediakan vaksin Covid-19 secara gratis bagi masyarakat, meski .Menurut Nihayatul, penyediaan vaksin secara gratis itu telah menjadi hak dasar bagi seluruh warga Indonesia selama masih berlangsungnya pandemi Covid-19.

Selain itu, dia menilai bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga masih memiliki anggaran yang sangat cukup untuk dialokasikan ke kebutuhan penyelenggaraan program vaksinasi Covid-19. "Masih ada anggaran sepertinya untuk vaksin. Kalau PEN kebanyakan kan kemarin untuk sosialnya bukan untuk vaksinnya, jadi sebenarnya anggaran Covid-19 masih bisa ter-cover oleh anggaran Kemenkes," terang Nihayatul di Kantor DPP PKB, Kamis (5/1/2023).

Adapun pengalokasian dana kesehatan telah menjadi salah satu aturan yang ditetapkan dalam undang-undang. Sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota diminta untuk dapat mengalokasikan minimal 10 persen anggaran pendapatan dan belanja di luar gaji untuk keperluan anggaran kesehatan.

Vaksin 6 bulan- 11 tahun Dipastikan Free

Terkait vaksinasi Covid-19 bagi anak usia 6 bulan sampai 11 tahun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan akan diberikan secara gratis. Hal tersebut menyusul

adanya izin penggunaan vaksin pfizer bagi anak-anak oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Serta Komisi IX DPR RI yang meminta pemberian vaksin bagi anak kelompok usia tersebut ditanggung oleh negara.

Budi menyebut, Kemenkes memiliki anggaran yang cukup untuk program vaksinasi anak 6 bulan hingga 11 tahun, meski anggaran penanganan Covid-19 dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah tidak dianggarkan oleh Kementerian Keuangan pada 2023.

"Dengan adanya vaksin sudah bisa turun ke bawah, otomatis pemerintah akan melakukan. Anggarannya cukup. Kita ada anggarannya untuk bisa melakukan vaksinasi ini secara gratis," kata Budi dalam konferensi pers virtual, Kamis (5/1). Dengan sudah adanya izin dari BPOM maupun ITAGI mengenai vaksinasi kepada anak, maka Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah memiliki dasar pelaksanaan.

"Jadi memang ini kan kita memberikan kepada anak-anak ini kan sudah ada ahlinya, ITAGI dan BPOM. Jadi selama ITAGI dan BPOM belum memberikan opini bahwa ini (vaksin) perlu diberikan, kita tidak berani memberikan karena takut. Dengan adanya ini otomatis pemerintah akan melakukan," kata Budi.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan segera memproses vaksinasi Covid-19 bagi anak mulai 6 bulan secara gratis. Untuk vaksin yang akan digunakan ialah Pfizer. Namun Budi tak menutup kemungkinan jenis vaksin lain akan digunakan untuk vaksinasi anak apabila sudah mendapatkan izin penggunaan. "Sekarang adanya Pfizer, jadi kita akan mulai dengan Pfizer dulu. Tapi kalau ada merk lain vaksin yang bisa untuk anak kita akan berikan," imbuhnya.

Sebagai informasi, BPOM telah memberikan EUA untuk vaksin Comirnaty Children yang

dikembangkan Pfizer untuk usia 5-11 tahun pada 29 November 2022 dan vaksin Comirnaty Children usia 6 bulan - 4 tahun pada 11 Desember 2022. Berdasarkan ketentuan BPOM, dosis vaksin Comirnaty Children untuk usia 6 bulan - 4 tahun untuk vaksinasi primer adalah 3 mcg/0,2 mL yang diberikan dalam 3 dosis pemberian. Dua dosis pertama diberikan dalam rentang waktu 3 minggu, diikuti dengan dosis ketiga yang diberikan setidaknya 8 minggu setelah dosis kedua. Sementara dosis vaksin Comirnaty Children untuk usia 5-11 tahun untuk vaksinasi primer adalah 10 mcg/0,2 mL, diberikan dalam 2 dosis dengan rentang waktu 3 minggu antara dosis pertama dan kedua.

Perawatan Bakal Ditanggung BPJS

Sementara mengenai biaya perawatan pasien corona, Menteri Budi membuka peluang ditanggung BPJS Kesehatan. Rencana ini masih akan ditinjau (review) dan dikaji lebih lanjut. Kajian pembiayaan pasien corona lewat mekanisme BPJS Kesehatan ini pun melihat perkembangan situasi Tanah Air selepas pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Peninjauan pembiayaan akan dilakukan bertahap. "Secara bertahap, nanti akan kita review," ungkap Budi Gunadi.

Mekanisme pembiayaan pasien Covid-19 yang direncanakan

ditanggung BPJS Kesehatan turut mempertimbangkan kondisi dan gejala pasien, terutama berkaitan dengan komorbid. Pembiayaan pasien komorbid yang positif corona dapat ditanggung BPJS Kesehatan.

Artinya, apabila pasien positif corona memiliki riwayat komorbid, maka pengobatan dan pembiayaan yang menjadi tanggungan BPJS Kesehatan nantinya disesuaikan tergantung penyakit komorbidnya. Berbeda yang selama ini, pasien positif yang punya komorbid tetap ditanggung Pemerintah.

"Kalau dulu kan semua penyakit asal Covid-19 ditanggung (Pemerintah). Tapi kalau sekarang, oh sebenarnya yang bersangkutan penyakitnya jantung tapi dites ada positif Covid-19, itu mungkin kami kembalikan ke mekanisme normal, ke BPJS di mana karena ada sakit jantungnya," jelas Budi Gunadi.

"Atau dia sakit cancer (kanker) mesti lakukan kemoterapi, dites positif Covid-19. Dulu kan masuk juga sebagai pasien positif corona yang punya riwayat komorbid."

Tak hanya rencana ditanggung BPJS Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin juga menyebut mekanisme lain dapat pula melalui asuransi kesehatan swasta yang dimiliki pasien bersangkutan. Bahkan tak menutup kemungkinan pembiayaan pasien corona dapat ditanggung biaya pribadi. (wid,ist,rls/dya)

SITUASI COVID-19 DI INDONESIA

Update 05 Januari 2023

Konfirmasi

6.722.227

Sembuh

6.552.823

Meninggal

160.665

Vaksinasi ke-1

204.057.916

Vaksinasi ke-2

174.818.471

Vaksinasi ke-3

68.672.995

Vaksinasi ke-4

1.183.061



Sumber : covid19.go.id

Masyarakat Ajukan Gugatan Uji Formil Perpu Cipta Kerja

JAKARTA - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Cipta Kerja yang diteken Presiden Joko Widodo pada 30 Desember menuai banyak pro kontra di masyarakat. Bahkan, sejumlah unsur masyarakat sipil mengajukan gugatan uji formil atas Perpu Cipta Kerja buatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (5/1/2023).

Kalangan masyarakat sipil tersebut menilai bahwa Jokowi telah melecehkan putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. "Perpu ini kami anggap pelecehan terhadap konstitusi dan pembangkangan terhadap UUD 1945," kata perwakilan penggugat, Viktor Santoso Tandiasa, dikutip dari tempo.co, Kamis (5/1/2023).

Sebelumnya, pada 25 November 2021, MK memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja cacat secara formil. Lewat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan meminta pemerintah memperbaikinya paling lama dalam 2 tahun.

Bukannya memperbaiki UU, Jokowi malah menerbitkan Perpu Cipta Kerja pada 30 Desember dengan alasan ada kegentingan yang memaksa untuk mengantisipasi ancaman krisis ekonomi. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md menyebut Perpu ini alasan kegentingan memaksa untuk penerbitan Perpu sudah terpenuhi, sesuai dengan Putusan MK Nomor 138/PUU/2009.

MK sudah menyatakan UU Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi dan harus diperbaiki agar partisipasi masyarakat lebih maksimal. Bukannya memperbaiki, kata Viktor, pemerintah malah mengeluarkan Perpu dengan proses yang tertutup. Padahal, kata dia, waktu satu tahun yang tersisa masih cukup bagi pemerintah untuk memperbaiki UU Cipta Kerja.

Di sisi lain, Viktor yang sebelumnya juga jadi koordinator Tim Kuasa Hukum pada gugatan UU Cipta Kerja, yang menghasilkan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, telah menyebut tindakan Jokowi adalah bentuk perbuatan melanggar hukum pemerintah atas Putusan MK. "Bahkan dapat dikatakan bentuk pembangkangan terhadap konstitusi," kata Viktor pada 31 Desember lalu.

Akan tetapi saat itu, Viktor mengaku punya pengalaman bahwa menguji Perpu di MK akan sia-sia karena proses persidangan yang memakan waktu lama. Khawatirnya objek gugatan yaitu Perpu sudah keburu jadi UU ketika nanti ditetapkan DPR, sehingga permohonan akan ditolak.

Di satu sisi, Viktor tak membantah



(Ilustrasi) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Cipta Kerja yang diteken Presiden Joko Widodo menuai banyak pro kontra di masyarakat

upaya gugatan Perpu ini sangat sempit, karena dia yakin DPR pasti akan menyetujui Perpu Cipta dari Jokowi ini untuk meringankan beban mereka. "Karena untuk merevisi UU dan DPR dan presiden, sementara 2023 masuk tahun politik, anggota DPR pasti akan sibuk di dapil (daerah pemilihan)-nya," kata Viktor

Perpu Cipta Kerja juga menuai kritik dari Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri. Dia mengatakan bahwa penerbitan Perpu (UU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja untuk menggenjot nilai investasi itu kurang pas. Di mana pemerintah menyebutkan terbitnya Omnibus Law itu demi mencapai target investasi 2023 yang mencapai Rp 1.200 triliun.

Sementara, lanjut Faisal Basri, sebetulnya nilai investasi yang ditanamkan di Indonesia sudah tinggi. "Tapi investasi di Indonesia itu temannya Butan dan Myanmar, itu investasinya otot. Jadi yang dibangun itu bukan otak, tapi building and construction," tuturnya dalam diskusi

publik secara virtual yang diselenggarakan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Kamis (5/1/2023).

Adapun investasi di Tanah Air yang dimanfaatkan untuk pembangunan bangunan dan konstruksi mencapai 83 persen. Kemudian 2 persen lainnya untuk pembangunan transportasi. Sedangkan pemanfaatan suntikan modal untuk pembangunan IT capital dan other non IT capital hanya di kisaran 1 hingga 11 persen.

"Jadi sungguh dari sini saja menunjukkan semakin besar ini, pertumbuhannya semakin tidak berkualitas, karena investasi yang didengung-dengungkan itu sekedar bikin ibu kota, LRT, MRT, kereta cepat," ujar Faisal Basri.

Meski masyarakat tak menolak pembangunan fisik yang direncanakan pemerintah, ia menilai seharusnya pembangunan tersebut juga diiringi oleh suntikan modal pada sektor yang dapat meningkatkan kemampuan tenaga ahli di Tanah Air.

Ia menyebutnya sebagai suntikan otak dalam bentuk IT capital, other non IT capital, dan research and development (R&D).

Sedangkan saat ini, ia menilai kondisi penelitian dan pengembangan di Indonesia sangat lemah, bahkan terlemah berdasarkan Global Knowledge Index (GKI). Dalam laporan GKI 2022, R&D Indonesia berada di urutan 81 dari 132 negara. Tercatat komponen paling buruk adalah kategori research, development and innovation yang rankingnya berada di urutan 115.

"Paling buruk ini R&D nya. Kalau R&D-nya jelek, maka inovasinya juga jelek. Padahal inilah yang menunjang untuk mendukung sustainability dari pertumbuhan itu, kalo nggak ada R&D ya susah," kata Faisal Basri.

Karena buruknya R&D, kondisi industri di Indonesia pun menjadi tidak berdaya saing. Ia merujuk pada Global Innovation Index 2022, di mana R&D Indonesia berada di urutan 75 dari 132 negara. Sehingga tidak hanya pertumbuhan ekonominya rendah, kata Faisal Basri, penggunaan otak di Indonesia pun terus merosot penggunaan.

"Itulah yang pada akhirnya hampir bisa dipastikan Indonesia akan mengalami middle income trap tidak terhindarkan kalau business as usual masih dikerjakan terus seperti sekarang ini," ujar Faisal Basri. (lut,tempo/dya)



Perpu ini kami anggap pelecehan terhadap konstitusi dan pembangkangan terhadap UUD 1945,"

VIKTOR SANTOSO TANDIASA
Perwakilan Penggugat

Ditetapkan Sebagai Tersangka, KPK Duga Gubernur Papua Terima Rp 1 Miliar



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi (Foto : Papua.go.id)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Papua, Lukas Enembe, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Dia dijerat dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi atas proyek infrastruktur.

Penetapan sebagai tersangka tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (5/1/2023).

Selain Lukas, KPK juga menetapkan Rijatono Lakka (RL) yang merupakan Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP). Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan PT TBP itu didirikan pada 2016 dan bergerak di bidang konstruksi.

"KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan tersangka LE (Lukas Enembe) Gubernur Papua 2013-2018 dan 2018-2023 sebagai tersangka," katanya dikutip dari detik.com, Kamis (5/1/2023).

Sebelumnya, KPK sempat memanggil Lukas Enembe untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun Lukas Enembe absen dengan alasan sakit. Sehingga, pengumuman Lukas sebagai tersangka secara resmi baru bisa dilakukan.

Setelah Lukas absen saat dipanggil, KPK kemudian berangkat ke Papua untuk memeriksa Lukas Enembe. KPK juga membawa tim dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk memeriksa kondisi kesehatan Lukas Enembe.

Selain mengumumkan penetapan tersangka terhadap Lukas Enembe, KPK mengumumkan penetapan tersangka dan penahanan Rijatono Lakka. Alexander menyebut Rijatono diduga menyuap Lukas Enembe.

KPK menduga Lukas menerima

suap Rp 1 miliar. "Untuk proyek konstruksi, perusahaan tersangka RL diduga sama sekali tidak memiliki pengalaman karena sebelumnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi," kata Alexander di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, dikutip dari detim.com. Kamis (5/1/2023).

KPK mengungkapkan bahwa Rijatono mengikuti lelang berbagai proyek infrastruktur di Papua pada 2019-2021. Untuk mendapatkan lelang, lanjut Alexander, Rijatono diduga memberikan sejumlah uang pada Lukas. Selain pada Lukas Enembe, Rijatono juga menemui beberapa pejabat di Pemprov Papua.

Alexander menduga Rijatono sepakat untuk memberi fee 14 persen dari total nilai kontrak yang didapat setelah dikurangi pajak. Suap itu diduga diberikan ke Lukas Enembe dan beberapa pejabat.

Dengan cara ini, Rijatono mendapat tiga paket proyek, yakni: Proyek multiyears peningkatan jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp 14,8 miliar; Proyek multiyears rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp 13,3 miliar; proyek multiyears penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp 12,9 miliar

"Setelah terpilih untuk mengerjakan proyek dimaksud, Tersangka RL diduga menyerahkan uang pada Tersangka LE dengan jumlah sekitar Rp 1 miliar," ucapnya.

KPK juga menduga Lukas Enembe menerima gratifikasi dari pihak lain berjumlah miliaran rupiah. "Diduga Tersangka LE juga diduga telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya hingga jumlahnya miliaran rupiah yang saat ini KPK sedang

kembangkan lebih lanjut," ujarnya.

Akibat perbuatannya, KPK menjerat Rijatono dengan pasal 5 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara, Lukas Enembe dijerat pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meski sudah menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe dan penyuapnya Rijatono Lakka dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur. Namun, KPK baru menahan Rijatono Lakka. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, mengatakan Lukas Enembe melalui pengacaranya menyebut kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk menjalani proses hukum. Oleh sebab itulah, kata dia, KPK belum menahan politikus Partai Demokrat tersebut hingga saat ini.

"Kami juga sudah menawarkan opsi kepada yang bersangkutan agar proses hukum bisa tetap berjalan," kata Alex.

Salah satu opsi yang ditawarkan KPK adalah Lukas Enembe ditahan terlebih dahulu oleh KPK. Jadi, Alex mengatakan setelah Enembe berstatus tahanan maka KPK akan memberi izin Lukas berobat ke luar negeri.

"Tapi sekali lagi yang bersangkutan harus menjadi tahanan KPK agar kami bisa fasilitasi," ujar dia.

Selain itu, Alex mengatakan opsi lainnya adalah KPK mempersilakan Lukas Enembe berobat namun di Jakarta. Ia menyebut KPK merekomendasikan Lukas untuk berobat ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat.

Selain terkendala kesehatan Lukas Enembe, Alex juga mengatakan terdapat masalah keamanan di Papua.

Ia menjelaskan KPK sampai berkoordinasi dengan aparat militer saat melakukan pemeriksaan Lukas Enembe di Papua.

"Kami dalam perkara ini berkoordinasi dengan kapolda setempat, kodim, dan kabinda setempat," ujar dia.

KPK menyebut Rijatono Lakka menyulap perusahaan farmasi PT Tabi Bangun Papua menjadi perusahaan infrastruktur. Alasannya, lembaga antirasuah tersebut mendapati perusahaan itu mendapat proyek senilai Rp.41 miliar dari Gubernur Papua Lukas Enembe.

Pada 2016, PT Tabi Bangun Papua banting setir menjadi perusahaan konstruksi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan setelah pengalihan tersebut PT Tabi Bangun Papua mendapat proyek pembangunan senilai Rp.41 miliar selama periode 2019 sampai 2021.

"Mendapat tiga buah proyek multi year yaitu; peningkatan jalan Entrop-Hamadi, proyek rehab sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi, dan proyek penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI," ujar dia dalam konferensi pers penahanan Kamis 5 Januari 2023.

Alex menambahkan PT Tabi Bangun Papua belum pernah menggarap proyek konstruksi sebelumnya. Pasca peralihan perusahaan tersebut, kata dia, barulah PT Tabi Bangun Papua mulai mengerjakan proyek yang berhubungan dengan bangunan gedung.

"Untuk proyek konstruksi, perusahaan Tersangka RL diduga sama sekali tidak memiliki pengalaman karena sebelumnya adalah perusahaan yang bergerak dibidang farmasi," kata Alex. (lut/dya)



KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil keterangan saksi dan bukti-bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan tersangka LE (Lukas Enembe) Gubernur Papua 2013-2018 dan 2018-2023 sebagai tersangka,"

ALEXANDER MARWATA
Wakil Ketua KPK





7 Rekomendasi
**WISATA
LUMAJANG**
dengan Pemandangan Indah

Sumber : Berbagai Sumber Diolah



Wisata Hutan Bambu



Air Terjun Coban Pawon



Puncak B29

SALAH satu daerah yang terkenal akan penghasil buah pisang adalah Lumajang. Tidak heran jika memang kamu pernah mendengar jika wilayah ini disebut dengan kota pisang.

Sementara di wilayah lumajang berbatasan dengan daerah yang memiliki alam pegunungan seperti Jember yang ada di sebelah timur, Malang yang ada di sebelah barat dan Probolinggo yang ada di sebelah utara.

Satu hal yang tidak kalah penting adalah tempat wisata lumajang yang harus kamu kunjungi.

Salah satu destinasi wisata yang terkenal adalah Gunung Semeru. Namun, bukan berarti hanya ada Gunung Semeru saja yang menjadi daya tarik di kota ini. masih banyak destinasi wisata yang bisa kamu kunjungi Ketika ke lumajang.

Berikut beberapa rekomendasi tempat wisata di Lumajang

1. Wisata Hutan Bambu

Ada kesan yang menyenangkan dan jauh dari kesan angker jika kamu membayangkan wisata hutan bambu seperti yang lainnya.

Ada panorama menarik dan elok karena kamu bisa menikmati jalan-

jalan dengan menyusuri pepohonan bambu.

2. Air Terjun Coban Pawon

Coban Pawon merupakan destinasi wisata lumajang yang menawarkan pesona alam yang cukup unik. Sebab, air terjun ini berada di goa yang mirip dengan pawon (dapur).

Konon setiap percikan air terjun ini bisa menyembuhkan berbagai penyakit.

3. Puncak B29

Tempat ini menyuguhkan pemandangan puncak seperti negeri di atas awan. Berada di Desa Argosari, Kecamatan Senduro akses jalan untuk mencapai puncak ini cukup terjal dan menantang.

Kemiringan mencapai sekitar 10 hingga 40 derajat dan beberapa lingkungan membuat kamu harus berhati-hati.

4. Gunung Semeru

Gunung ini memiliki mitos yang masih ada hingga saat ini, dimana Gunung Semeru dipercayai merupakan tempat tinggal para dewa, menurut kepercayaan masyarakat

Hindu-Budha. Gunung yang masih aktif ini paling tidak 20 menit sekali kawahnya mengeluarkan abu vulkanik berwarna hitam dan pasir.

5. Danau Ranu Kumbolo

Danau ini terletak di lereng Gunung Semeru. Danau ini juga termasuk tempat untuk mengambil air terakhir sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ke puncak Semeru.

Terlebih lagi, kamu tidak akan menjumpai mata air lainnya hingga puncak Semeru.

Pemandangan di sekitar danau memang benar-benar menakjubkan, tidak heran jika wisatawan datang kesini untuk menghabiskan waktu liburan dengan mendirikan tenda-tenda di pinggir danau ini.

6. Tubing Adventure Kali Betoto

Tubing atau yang dikenal dengan body rafting merupakan jenis olahraga air yang cukup menantang.

Uniknya kegiatan meluncur bebas atau istilahnya dalam bahasa jawa yaitu kintir Kali Betoto yang berarus deras ini dengan menggunakan ban dalam truk.



7. Ranu Pane

Ranu pane ini lokasinya tidak jauh dari danau Regulo. Lokasinya juga masih ada di dalam Kawasan Taman Nasional Tengger Semeru. Wisatawan akan disuguhi pemandangan indah Gunung Semeru mahameru yang bagian bawahnya terdapat kaldera.

Danau yang berwarna hijau ini memiliki luas 1 hektar dan saat ini masih menjadi salah satu objek wisata paling populer di Lumajang (Bisnis)



Gunung Semeru



Danau Ranu Kumbolo



Tubing Adventure Kali Betoto



Ranu Pane



ALDI TAHER BANTU

BIAYA PENGOBATAN INDRA BEKTI

ALDI TAHER ikut memberikan bantuan dengan berdonasi untuk meringankan biaya pengobatan Indra Bekti.

Aldi Taher mengungkapkan menyisihkan sebagian uangnya untuk dia donasikan pada Indra Bekti.

Lelaki berusia 39 tahun ini juga sempat membagikan foto berupa tangkapan layar bukti transfer ke rekening istri Indra Bekti, Aldila Jelita.

Atas bantuan dan kebaikan Aldi Taher, adik Indra yakni Cipta, mengucapkan terima kasih karena telah peduli pada kakaknya.

Mas Aldi orangnya itu memang baik, ya dia apa yang bisa dia lakukan apa yang bisa diberikan, akan coba semaksimal mungkin," ucap Cipta mengutip Kompas.

"Terima kasih sebanyak-banyaknya sama niat baik Mas Aldi," tutur Cipta.

Sebagai informasi, Aldi Taher memberikan bantuan berupa uang sebesar Rp1 juta untuk pengobatan Indra Bekti.

Melalui unggahannya di Instagram, Aldi pun turut memberikan semangat kepada Aldila.

"So what???? BISMILLAH semangat selalu kak @dhila_bekti," tulis Aldi Taher.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan akan selalu ada apabila Aldila dan keluarga Indra Bekti membutuhkan

bantuannya.

Tak lupa, Aldi Taher juga memanjatkan doa untuk kesembuhan Indra Bekti. (*)

Profil Aldi Taher

Aldi Taher populer sebagai aktor saat membintangi sebuah film bergenre horor, Terowongan Casablanca pada 2007. Sebelum melambung sebagai pemeran, wajahnya dikenal sebagai model majalah remaja dan bintang iklan.

Pria kelahiran Jayapura, 25 Oktober 1983 ini memulai debut kariernya setelah mengikuti ajang pencarian bakat model di salah satu majalah remaja Aneka Yess! pada 2001.

Selain menjadi model majalah, anak ketiga dari enam bersaudara pasangan Ramlis Saputra Sidi Rusli Taher dan Rosita Bagindo Oedin ini mulai berperan dalam berbagai video klip grup band yang sedang tenar di Indonesia.

Dia pernah jadi model video klip album Manusia Bodoh milik Ada Band, dan video klip Yon Koeswoyo Koes Plus.

Wajahnya makin sering tampil di televisi saat membintangi berbagai iklan seperti operator telepon seluler XL, sikat gigi formula, gel rambut Gatsby Wax, iklan rokok LA Lights, serta makanan seperti KFC dan Astor.

Setelah empat tahun malang melintang di dunia model dan iklan, Aldi memasuki tahap baru dengan menjadi finalis VJ MTV 2005. Aldi didaulat sebagai pembawa acara dalam beberapa program acara televisi di antaranya Go Show TPI, Pimp My Ride Indonesia di MTV, My Spesial Date ANTV, Mak

Comblang SCTV, Gatsby Date and Style MTV serta VJ MTV Bujang.

Lewat siaran yang banyak ditonton kalangan anak muda, Aldi Taher mulai mencuri perhatian pemirsa muda. Dari sini, tawaran bermain film dan sinetron mulai mengalir.

Film layar lebar perdananya bertema horor dengan judul Terowongan Casablanca pada 2007 produksi Indika Entertainment. Di film yang disutradari oleh Nanang Istiabudi ini Aldi berakting bersama Asya Shara, Ardina Rasti, Jupiter Fourtissimo, Five Vi, Ray Sahetapy, dan Titi Qadarsih.

Film horor pertamanya mendapat sambutan masyarakat. Pada tahun yang sama, Aldi kembali membintangi film horor dengan kekasihannya saat itu, Nadia Vega dengan judul film Leak. Film yang mengambil latar kehidupan mistik di Bali besutan sutradara Achiel N Nasrun juga dibintangi Meriam Bellina, Ferry Irawan, Piet Pagau, dan Umar Syarif.

Setelah layar lebar, Aldi merambah televisi melalui sinetron. Aldi membintangi beberapa sinetron di antaranya Ku Tlah Jatuh Cinta, Kisah 5 Matahari, Joe Bebek Emas, Anak Terminal Metropolitan, dan Hingga Akhir Waktu.

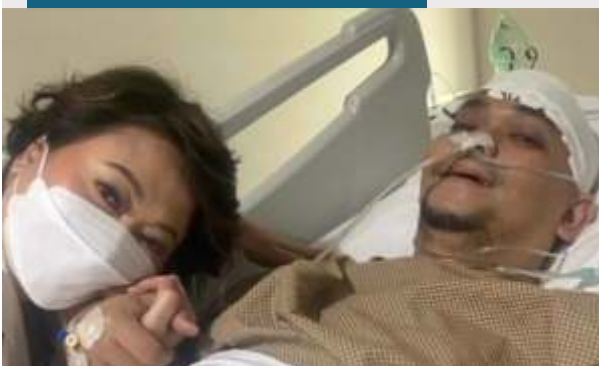
Aldi rupanya ingin menjelajah lebih jauh di dunia musik. Bersama Raffi Ahmad, Irwansyah, Naga Lyla, Mende Oris, dan Oki Oris, Aldi pernah membentuk band bernama Radio. Namun grup band ini tidak mendapat tempat sehingga akhirnya bubar.

Tak berhenti di situ, Aldi kembali mencoba membentuk duo bersama rekannya Bachan. Duo yang diberi nama Duo Kingkong

menelurkan single Cari Wanita pada 8 Desember 2008. Seperti halnya bandnya, duo ini tak sempat berkibar dan akhirnya menghilang. Tahun 2008, Aldi kembali membintangi dua judul film horor, yaitu Tiren: Mati Kemaren dan Pocong vs Kuntilanak.

Di film Tiren: Mati Kemaren dengan sutradara Adrianto Sinaga, Aldi beradu akting dengan penyanyi dangdut penuh kontroversi, Dewi Perssik. Ranti yang diperankan Dewi Perssik baru saja meninggal dan bergentayangan. Dia dapat berubah menjadi wanita cantik dan menggoda Reno (Aldi Taher), suami sahabatnya, Maya (Deriell Jacqueline). Di sinilah awal Aldi dan Dewi mulai saling kenal.

Di tahun yang sama, Aldi membintangi sebuah kisah horor dengan latar belakang kisah cinta zaman penjajahan Belanda. Aldi mengadu karakter bersama Ahmad Zaki, Allya Rossa, Ikhsan Samiaji, Diana Puspita, dan Amanda Faried (Berbagai sumber)



HYUNDAI MOTOR GROUP PERCEPAT TRANSISI KENDARAAN LISTRIK

HYUNDAI Motor Group mengatakan akan mempercepat transisi yang lebih luas ke kendaraan listrik tahun ini, sebagai upaya untuk menjadi penyedia solusi mobilitas di masa depan.

Menurut laporan Yonhap pada Selasa, Kepala Eksekutif Euisun Chung mengatakan perusahaan akan memperoleh pangsa yang lebih besar di pasar kendaraan listrik global dan menghasilkan pendorong pertumbuhan kendaraan otonom, mobilitas masa depan, dan robotika pada tahun 2023.

"Perusahaan akan melakukan investasi agresif untuk merekrut talenta yang telah terbukti di sektor bisnis pertumbuhan baru dan mengembangkan teknologi baru untuk menjadi penggerak pertama yang memimpin pasar mobilitas masa depan," katanya.

Tahun lalu, IONIQ 5 dari Hyundai Motor Co. memenangkan World Car of the Year 2022 dan EV6 dari Kia Corp. dinobatkan sebagai European Car of the Year 2022. Menurut Euisun Chung, hal tersebut menandai awal dari kesuksesan peralihan ke elektrifikasi.

Untuk kendaraan otonom, grup berencana untuk meluncurkan mobil dalam beberapa level. Level 3 memungkinkan perubahan jalur dan fungsi mengemudi otonom lainnya bekerja tanpa intervensi dari pengemudi.

Pada paruh pertama tahun ini, Hyundai Motor Group akan memperkenalkan Genesis G90 dan Kia EV9, sambil berencana mengkomersilkan layanan taksi robo yang berbasis IONIQ 5 dengan kemampuan otonom level 4 di AS melalui Motional, perusahaan patungan antara Hyundai Motor dan startup mobilitas AS, Aptiv.

Pada Level 4, kendaraan dapat mengemudi sendiri dalam kondisi terbatas dan tidak akan beroperasi jika semua kondisi yang diperlukan tidak terpenuhi. Sementara pada Level 5, fitur penggerak otomatis kendaraan dapat melaju dalam kondisi apapun.

Grup berencana untuk mulai meluncurkan sebagian besar kendaraan barunya sebagai software defined vehicles (SDV) di pasar global pada tahun 2025 dan memperbarui

kinerja serta fungsi semua kendaraan untuk dijual secara global pada tahun yang sama.

Adapun di lingkungan bisnis, Euisun Chung mengatakan bahwa dampak berkepanjangan dari pandemi COVID-19, kenaikan suku bunga dan harga, nilai tukar yang tidak stabil, dan konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina tetap menjadi kekhawatiran utama perusahaan.

Serius garap kendaraan listrik

Sementara itu PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) saat ini memang cukup serius menggarap pasar kendaraan elektrifikasi di Tanah Air. Terbukti, jenama asal Korea Selatan ini, mampu menjadi pemimpin segmen mobil listrik baterai alias Battery Electric Vehicle (BEV).

Berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pada 2021, model BEV Hyundai mendominasi penjualan ritel di segmen tersebut dengan 605 unit yang terjual dari total 693 transaksi ritel. Hal ini menjadikan Hyundai pemimpin pangsa pasar

mobil listrik penuh sebesar 87,3 persen.

Melalui kerja sama dengan pemerintah Indonesia dan mitra strategis lainnya, Hyundai telah membangun fasilitas pengisian daya kendaraan listrik di lebih dari 180 titik lokasi di penjuru Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua.

Secara bersamaan dalam berbagai kesempatan, Hyundai secara proaktif telah mengedukasi pelanggannya di Indonesia tentang manfaat memiliki EV serta memastikan bahwa EV dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari untuk semua orang.

Selain itu, keseriusan jangka panjang Hyundai dalam membangun ekosistem EV juga dibuktikan melalui kolaborasi bersama LG Energy Solution untuk menjaga pasokan sel baterai yang stabil untuk BEV, yaitu dengan mendirikan pabrik manufaktur sel baterai di Karawang, Jawa Barat, yang mana pembangunannya ditargetkan selesai pada semester pertama tahun 2024 (Ant)

HARIAN
LENERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"

PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI

OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)

PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI



BIRO: SURABAYA: LUTFI YUHANDI | MOJOKERTO: RAHMAD SURYADI | GRESIK-LAMONGAN: ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK: GATOT SUNARKO | TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI): IMAN SANTOSO, | MADIUN: IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA | TRENGGALEK: ANNGA PRAYOGA

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO | SEKERTARIS ISTIDHA NUR AMANAH,

DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, KIKI AMALIA GUYEN | ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | TELP 03187854491 | PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | TELP IKLAN 031-87854491 | NIB 91205006801134 | HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.



GINJAL BERMASALAH, SALAH SATUNYA OTOT KRAM

SAKIT ginjal bisa sangat mahal harganya untuk pengobatan. Ginjal merupakan organ penting dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk pemurnian darah dan menghilangkan cairan ekstra dari tubuh.

Ketika ginjal Anda tidak berfungsi dengan baik, maka masalah kesehatan mengintai Anda.

Dan saat ginjal bermasalah, ada beberapa tanda yang perlu Anda perhatikan pada tubuh Anda.

Berikut adalah tanda-tanda yang menandakan risiko Anda menderita penyakit ginjal kronis.



1. Mudah lelah

"Anda memiliki lebih sedikit energi atau kesulitan berkonsentrasi adalah pertanda buruk. Penurunan fungsi ginjal yang parah dapat menyebabkan penumpukan racun dan kotoran dalam darah.

Ini dapat menyebabkan orang merasa lelah dan lemah," kata Dr. Puru Dhawan, pakar Ginjal Ayurveda dan pendiri Sai Sanjivani.

2. Kulit kering dan gatal

Menurut Dr. Puru Dhawan (BAMS), ginjal yang sehat melakukan banyak pekerjaan penting. Mereka membuang limbah dan cairan ekstra dari tubuh Anda, membantu membuat sel darah merah, membantu menjaga tulang tetap kuat, dan bekerja untuk mempertahankan jumlah mineral yang tepat dalam darah Anda.

Kulit kering dan gatal bisa menjadi tanda penyakit mineral dan tulang yang sering menyertai penyakit ginjal lanjut, ketika ginjal tidak lagi mampu menjaga keseimbangan mineral dan nutrisi dalam darah Anda.

3. Darah di urin

"Ginjal yang sehat biasanya menjaga sel-sel darah di dalam tubuh saat menyaring limbah dari darah untuk membuat urin, tetapi ketika filter ginjal telah rusak, sel-sel darah ini dapat mulai "bocor" ke dalam urin.

Selain menandakan penyakit ginjal, darah dalam urin bisa menjadi indikasi adanya tumor, batu ginjal, atau infeksi", kata Dr. Dhawan.

4. Urin berbusa

Gelembung berlebihan dalam urin - terutama yang mengharuskan Anda untuk menyiram beberapa kali sebelum hilang - menunjukkan protein dalam urin.

Busa ini mungkin terlihat seperti busa yang Anda lihat saat mengocok telur, karena protein yang umum ditemukan dalam urin, albumin, adalah protein yang sama dengan yang ditemukan dalam telur.

5. Otot kram

Puru Dhawan juga menambahkan bahwa ketidakseimbangan elektrolit dapat

terjadi akibat gangguan fungsi ginjal. Misalnya, kadar kalsium yang rendah dan fosfor yang tidak terkontrol dengan baik dapat menyebabkan kram otot.

6. Pergelangan kaki bengkak

Penurunan fungsi ginjal dapat menyebabkan retensi natrium, menyebabkan pembengkakan di kaki dan pergelangan kaki.

Pembengkakan di ekstremitas bawah juga bisa menjadi tanda penyakit jantung, penyakit hati, dan masalah vena kaki kronis (Bisnis)



Ketua KPU Hasyim (dari hal 1)

KETUA KPU RI Hasyim Asy'ari melontarkan candaan saat bicara soal pelaporan dirinya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sambil bercanda, Hasyim mengatakan dirinya adalah bajingan dan ahli maksiat sementara DKPP hanya bisa mengadili orang yang punya kehormatan.

Candaan itu dilontarkan Hasyim dalam rapat koordinasi bersama KPU provinsi mengenai penataan daerah pemilihan (dapil) di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2023). Dia beranda-andai jika dirinya diadili terkait laporan perbuatan asusila dengan Hasnaeni 'Wanita Emas'.

"Kalau yang urusan 'Wanita Emas' itu, nanti dulu, belum selesai, nanti kalau saya diadukan itu, dalam sidang itu saya akan buat pengakuan. Pertama yang mulia, saya ini memang bajingan yang mulia," ujar Hasyim sambil tertawa. Para peserta rapat juga tertawa mendengar candaan Hasyim.

Hasyim melanjutkan candaannya. Dia mengatakan akan mengaku sebagai ahli maksiat. Oleh sebab itu, menurutnya, pengadu tersebut salah jika melaporkannya ke DKPP. "Yang mulia, saya ini ahli maksiat, yang mulia, karena lembaga ini lembaga Kehormatan Dewan Penyelenggara Pemilu, hanya boleh mengadili yang memiliki kehormatan. Menurut saya pengadu salah alamat," katanya sambil tertawa. Para peserta rapat juga tertawa.

"Yang diadukan ke sini hanya orang-orang yang punya kehormatan. Sementara saya ini ahli maksiat, nggak pantas saya dibawa ke sini yang mulia, kan begitu logikanya. Yang boleh dibawa ke situ yang punya kehormatan. Sementara saya di bagian awal saya sudah ngaku ahli maksiat, yang mulia, saya nggak punya kehormatan," sambung Hasyim.

Hasyim kemudian terus bercanda. Dia mengaku akan mengakhiri sidang dengan bertanya ke majelis soal siapa yang tak punya dosa. Dia sendiri mengaku tak masalah dilaporkan ke DKPP. "Nanti saya akan akhiri, yang mulia, mohon ditanyakan ke dalam majelis siapa pun yang ada ruangan ini, ada nggak di antara kita yang nggak pernah maksiat? Saya tanya yang di sini deh, ada nggak yang nggak pernah maksiat? Angkat tangan, resolusi 2023," katanya.

"Ya karena kita ini masih salat masih berdo'a robbigfirli, ampuni (aku) Tuhan ku, itu berarti kita ini masih mengaku ahli maksiat semua. Makanya nggak boleh sombong, masih ahli maksiat semua. Harus banyak-banyak berdo'a, harus banyak-banyak solat beribadah minta ampunan kepada Allah Yang Maha Kuasa dan Tuhan Yang Maha Esa," sambungnya.

Tak berhenti di situ Hasyim juga sempat melempar kelakar sekaligus wanti-wanti kepada para petugas KPUD. "Kita ini kalau mau menyapa saja sekarang harus hati-hati, saya bertanya, 'sehat semua?'. Nanti khawatir kayak Mas Idham, 'nanti kalau sakit harus dibawa ke mana?'"

kata Hasyim.

Hasyim mengatakan saat ini pemilihan kata harus selalu dipertimbangkan sebelum dilontarkan. Hal itu dikarenakan adanya aduan-aduan menyeret nama para komisioner KPU yang masuk ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Soalnya potongan kalimat itu sudah masuk ke media DKPP. Ampun, aduh. Kita ini harus hati-hati banget pilihan kata itu. Sekadar bertanya aja dikira mengintimidasi, Ketuanya dituduh mengintimi, Ketua Divisi Teknisnya mengintimidasi, Sekjennya eksekusi intimidasi. Kata dasarnya intim," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasyim mengatakan selain pemilihan kata, pemilihan baju pun menjadi sorotan. Dia menyebut warna pakaian komisioner KPU bisa saja dianggap memihak. "Pilihan warna baju juga gitu, kalau bajunya begini nanti dikira mendukung proporsional tertutup. Kalau bajunya begitu, dikira mendukung proporsional terbuka, itu repot loh," ucapnya.

Soal pengaduan ke DKPP, diketahui Hasyim Asy'ari dilaporkan oleh Gerakan Melawan Political Genocide (GMGP). Laporan tersebut terkait dugaan asusila terhadap Ketua Umum Partai Republik Satu Hasnaeni atau 'Wanita Emas'.

"Pada 22 Desember, tepatnya pada sore ini, membuat satu laporan tentang asusila dan etik, tepat di DKPP sebagai satu badan yang punya tugas untuk menyalurkan pelanggaran etika yang ada, bagi penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu," ujar Farhat Abbas di kantor DKPP, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2022).

Selanjutnya, pada Rabu (4/1), Ketua KPU RI kembali dilaporkan ke DKPP oleh Progressive Democracy Watch (Prodewa) sebagai Lembaga Pemantau Pemilu Nasional. Laporan tersebut mengenai pernyataan Hasyim terkait kemungkinan proporsional tertutup di Pemilu 2024.

Selain itu, Ketua Divisi Teknis KPU Idham Holik juga dilaporkan ke DKPP atas dugaan intimidasi petugas KPU daerah. Idham dilaporkan oleh beberapa petugas KPU daerah dengan diwakili oleh kuasa hukum. Dugaan intimidasi ini disebut terjadi saat acara konsolidasi nasional KPU.

"Kami melaporkan juga pelanggaran etik yang dilakukan oleh salah satu komisioner KPU pusat, Idham Holik, yang memberikan ancaman secara terbuka di acara konsolidasi nasional KPU se-Indonesia," ujar kuasa hukum petugas KPU daerah, Airlangga Julio, kepada wartawan di DKPP, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022).

Soal Dapil, Pengamat Ingatkan Potensi Intervensi

Terpisah, ahli kepemiluan sekaligus Ketua Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto, menilai bahwa partai politik akan berupaya mengintervensi KPU RI yang kini berwenang menata dan menetapkan daerah pemilihan (dapil) DPR RI dan DPRD provinsi.

Sebelumnya, kewenangan ini ada di tangan DPR RI yang telah mengunci dapil tersebut dalam Pasal 187 dan 189 serta Lampiran III dan IV Undang-undang Pemilu, namun pada Desember 2022 dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusan nomor 80/PUU-XX/2022 yang mengabulkan sebagian permohonan Perludem.

"Yang harus diperhatikan adalah kemungkinan intervensi, kengototan partai tertentu, itu pasti terjadi. Namanya juga usaha," kata Didik.

Didik juga menegaskan, untuk mencegah intervensi itu, ataupun anggapan bahwa KPU RI "masuk angin" dalam menata dapil ini, KPU RI harus transparan dan siap menjelaskan kepada publik soal desain dapil yang mereka susun nanti. "KPU harus terbuka. Kalau enggak terbuka, dia enggak dapat dukungan publik. Kalau dia diam-diam, parpol akan dengan gampang melakukan intervensi menghendaki dapil tertentu sesuai kepentingan politik mereka," ungkap Didik.

Terpisah, Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengungkapkan, ada 3 kemungkinan sikap KPU RI dalam menata dapil, yang diprediksi bakal memiliki dampak yang berlainan terhadap nasib elektoral partai politik di parlemen. Pertama, KPU hanya menata ulang sedikit dapil yang kontroversial. Jika ini yang terjadi, maka parpol parlemen diprediksi tak akan terganggu.

Kedua, KPU menata ulang sejumlah dapil yang bermasalah dari segi proporsionalitas jumlah penduduk dan alokasi kursi. Ini berpeluang mengganggu suara parpol parlemen, namun tidak terlalu besar. Ketiga, KPU bisa saja melakukan langkah progresif dengan menata ulang seluruh dapil.

Hal ini diperkirakan bakal memberi peluang bagi parpol pendatang baru untuk merebut alokasi kursi di dapil yang sebelumnya dikuasai parpol parlemen. Kerugian elektoral semacam ini yang diduga bakal mendorong parpol parlemen, yang tak ingin stabilitas kekuasaannya terusik gara-gara dapil ditata ulang, untuk mengintervensi KPU RI. "Jadi pilihan apa yang akan diambil KPU tentu akan memberi efek pada suara partai," ujar Arya.

Ketua KPU Hasyim memastikan pihaknya bakal melibatkan partai politik dalam penataan dan penyusunan daerah pemilihan (dapil) DPR RI dan DPRD provinsi. Saat ini, KPU RI telah berkonsultasi dengan tim ahli terkait penataan dapil. Sementara itu, KPU tingkat provinsi baru saja mempresentasikan simulasi dapil yang mereka susun dalam rapat koordinasi internal hari ini, Kamis (5/1/2023) di kantor KPU RI.

Hasyim meminta KPU tingkat provinsi segera melakukan uji publik atas simulasi mereka, lalu hasilnya disampaikan kembali ke KPU RI untuk dimatangkan dalam draf peraturan KPU tentang penyusunan dan penataan dapil. "Kemudian bila sudah relatif matang, kemudian kita jadikan bahan untuk diskusi dengan para ahli, istilahnya itu FGD ya, focus group

discussion. Setelah itu kemudian diuji publik draf peraturan KPU tersebut yang melibatkan para pihak," jelas Hasyim ketika membuka rapat koordinasi.

"Khusus untuk daerah pemilihan ini, nanti yang akan diundang terutama end user, pengguna pemilihan yaitu partai politik," imbuhnya.

Draf ini kemudian akan menjadi bahan konsinyering dengan partai-partai politik. Hasyim bahkan mengungkap kemungkinan konsinyering ini berlangsung 2 kali. Sebagai informasi, terdapat 18 partai politik tingkat nasional dan 7 partai politik lokal Aceh yang sudah ditetapkan oleh KPU RI sebagai peserta Pemilu 2024. "Kami meyakini bahwa masing-masing parpol pasti punya cara berpikir, analisis sendiri mengenai penyusunan dapil yang ada ini," ujar Hasyim. (ist,wid,rls/dya)

Tentang Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dilantik pada 29 Agustus 2016;
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah (2003-2008);
3. Dosen pada Bagian Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang (sejak 1998-2016);
4. Dosen pada Program Studi Doktor Ilmu Sosial, Konsentrasi Kajian Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip), Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang (sejak 2013-sekarang);
5. Dosen pada Program Doktor Ilmu Kepolisian, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian Republik Indonesia (Lemdiklatpolri), Jakarta, dalam mata kuliah: Analisis Strategi Keamanan (sejak 2016);
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dilantik pada 12 April 2022.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Ph.D. (Doctor of Philosophy) dalam bidang Sosiologi Politik, Department of Anthropology and Sociology, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, menulis Disertasi "Konsolidasi Menuju Demokrasi: Kajian Tentang Perubahan Konstitusi dan Pilihan Raya 2004 di Indonesia", lulus 2012.
2. Magister Sains (M.Si.) dalam bidang Ilmu Politik, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, menulis Tesis "Demokratisasi Melalui Civil Society: Studi Tentang Peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam Pemberdayaan Civil Society di Indonesia 1971-1996", lulus 1998.
3. Sarjana Hukum (S.H.), Jurusan Hukum Tata Negara (HTN), spesialisasi Kajian Hukum dan Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED), Purwokerto, menulis Skripsi "Pembreidelan Pers: Studi Terhadap Pembatalan SIUPP Sebagai Bentuk Pembatasan Kebebasan Pers", lulus 1995.
4. Pondok Pesantren Al-Hidayah, Karangasuci, Purwokerto (1991-1995).
5. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kudus, Jurusan Fisika (A1) (1988-1991).
6. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kudus (1985-1988).
7. Madrasah Diniyyah As-Salam, Panjunan Wetan, Kudus (1979-1988).
8. Sekolah Dasar Negeri (SDN) Panjunan, Kudus (1979-1985).



Rencana Reshuffle Memanas, Isu Menteri Mundur Guncang Nasdem



Tiga menteri NasDem, Siti Nurbaya Bakar, Johnny G Plate, dan Syahrul Yasin Limpo (kiri ke kanan), diisukan bakal terkena reshuffle oleh Jokowi.

JAKARTA - Pemerintah Pakistan menutup mal dan pasar lebih awal menjadi pukul 08.30 malam waktu setempat demi menghemat penggunaan listrik di tengah krisis ekonomi dan energi. Mengutip Reuters, Rabu (4/1/2023), Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif mengatakan upaya tersebut bisa menghemat uang negara sebesar 62 miliar rupee Pakistan atau sekitar Rp 4,25 triliun.

Menkominfo Johnny G Plate menjawab isu mundur. Ia menegaskan sampai saat ini masih menjabat sebagai anggota Kabinet Jokowi-Ma'ruf. "Mengingat informasi terkait dengan tugas kami sebagai Menkominfo RI yang telah beredar secara luas di masyarakat. Khususnya dalam media sosial maka dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini kami masih melaksanakan tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh bapak Presiden sebagai anggota kabinet Indonesia Maju," kata Johnny G Plate, Kamis (5/1/2023).

Namun demikian, lanjut dia, perlu ditegaskan kembali bahwa membentuk dan mengubah atau mengganti anggota kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif Presiden Jokowi. "Kami percaya dan yakin bahwa setiap partai politik di Indonesia memahami, memaklumi dan menjaga hak konstitusional."

Sebelumnya, Sekjen NasDem itu meminta agar masyarakat tidak mudah percaya pada isu yang belum jelas kebenarannya dan tanpa ada konfirmasi. "Marilah kita bersama menjaga agar informasi yang didistribusi dan ditransmisikan kepada masyarakat terlebih dahulu harus dikonfirmasi agar akurasinya

dapat dipertanggung jawabkan dan demi mencerdaskan masyarakat," tutup Plate.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang menyarankan 2 menteri NasDem yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Menteri Pertanian mundur di tengah isu reshuffle mencuat. Ali menilai tak etis seorang kader partai politik menyinggung hak prerogatif Presiden.

"Tidak etis kalau kemudian misalnya parpol masuk di ruang yang bukan kewenangannya. Karena yang punya hak mengevaluasi terhadap kabinet itu kan Pak Presiden. Jadi bagi NasDem tidak ada orang yang bisa menyuruh-nyuruh NasDem untuk keluar, karena kita berada di pemerintahan dibangun berdasarkan komitmen 2019 (sampai) akhir waktunya 2024," kata Ali, Kamis (5/1/2023).

Ali menyebut partainya tegak menjalani komitmen yang dibangun sejak 2019. Apapun kebijakan yang diambil Jokowi, NasDem akan diterima. NasDem kata Ali tidak akan mundur dari kabinet. Dia mengatakan tidak ada hak PDIP menyuruh NasDem mundur. "Apapun keputusan Presiden kami terima, tapi kalau kemudian NasDem disuruh mundur, rasanya kami nggak mau mengkhianati komitmen itu," tutur Ali.

"Pertanyaannya, 'Apa haknya PDIP menyuruh kami mundur?' karena koalisi pemerintahan itu derajatnya partai koalisi sama, tidak ada pimpinan koalisi di situ," sambungnya.

Ali mengatakan sebenarnya NasDem tak ada masalah dengan PDIP.

Bahkan pihaknya sempat melakukan beberapa upaya menjaga hubungan baik dengan partai berlambang banteng itu. Ali mengambil contoh saat ramainya isu Harun Masiku dan Mensos Juliari Batubara di pemberitaan televisi. Menurut Ali, ada arahan langsung dari Surya Paloh untuk menjaga hubungan baik.

"Kami punya kesempatan menyerang PDIP lewat media televisi kami tidak pakai buzzer untuk melakukan itu. Tapi, itu tidak dilakukan karena perintah Ketum NasDem untuk menjaga hubungan baik. Sesama parpol, sesama partai koalisi, kami tidak mau mengambil keuntungan (dari) kesalahan orang lain. Itu upaya-upaya yang bisa dilakukan kami, menjaga hubungan baik itu. Kami tidak pernah ada masalah dengan PDIP," tutur Ali.

Ali menyebut tak mau mengevaluasi menteri dari partai lain lantaran bukan kewenangannya. Ali lantas bersyukur karena menteri NasDem tak pernah ditangkap oleh KPK. "Mungkin Pak Djarot merasa masih kurang PDIP itu. Kami nggak punya kewenangan untuk mengevaluasi menteri-menteri lain, itu hak Presiden. Ya, walaupun Alhamdulillah, Alhamdulillah, menteri NasDem nggak ada yang ditangkap KPK. Alhamdulillah ya," pungkasnya.

Menanti Kepastian Jokowi

Sementara, Presiden Joko Widodo menjawab singkat ketika ditanyakan soal kocok ulang kabinet atau reshuffle. "Besok. Ya besok," kata Jokowi saat kunjungan kerja ke Dumai, Riau, Kamis (5/1/2023).

Jokowi tidak mempertegas maksud pernyataannya ihwal kapan reshuffle kabinet dilakukan. Dia kembali bicara dengan nada bercanda. "Bisa Jumat, bisa Senin, bisa Selasa, bisa Rabu," kata Jokowi.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengomentari kabar kemungkinan reshuffle kabinet yang kembali menghangat di Istana. Kapan reshuffle digelar?

Ali memprediksi reshuffle kabinet akan digelar di bulan Januari 2023 ini. "Mungkin Januari. Kita tunggu bareng-bareng," kata Ngabalin kepada wartawan, Kamis (5/1/2023).

Menurut Ngabalin, siapa pun yang diganti nantinya dalam reshuffle kabinet harus dapat menerima keputusan Presiden Jokowi tersebut. "Kalau nanti ada menteri yang diganti harus tetap semangat dan tersenyum seperti saat awal anda dipilih. Jangan marah, jangan dongkol karena waktu anda sudah sampai di sini saja," tutur Ngabalin.

Bagi Ngabalin, mereka yang dicopot tetap harus berterimakasih kepada Presiden Jokowi yang sudah mengamanatkan jabatan tersebut. "Tetap dan harus berterima kasih pada Presiden saat diangkat dan diberhentikan oleh beliau," ujar Ngabalin. (wid,rls,ist/dya)

5 MENTERI & PEJABAT SETINGKAT MENTERI DENGAN KEPUASAN KINERJA TERTINGGI

sumber : Poltracking (November 2022)

